

Judul	Does environment centralization prevent local governments from racing to the bottom? –Evidence from China
Jurnal	Journal of Cleaner Production
Tahun	2019
Penulis	Tao Hong a, Nannan Yu a, Zhonggen Mao
Reviewer	Dini Ockti Irani
NPM	2022311003

Introduction	Lingkungan adalah sumber daya umum yang khas yang bersaing dalam konsumsi dan tidak dapat dikecualikan. Karakteristik seperti itu sering menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan dan apa yang disebut “tragedi milik bersama” (Hardin, 1968). Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dianggap sebagai salah satu fungsi dasar pemerintah. Namun, penentuan bagaimana konsentrasi tata kelola lingkungan dipusatkan atau didistribusikan ke pemerintah daerah bergantung pada trade-off antara efek limpahan dan keunggulan informasi. Jika terlalu banyak kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, tingkat pencemaran akan lebih tinggi tingkat optimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang karena efek limpahan. Namun, jika kekuatan terlalu terkonsentrasi di pusat pemerintah, dan pemerintah daerah membanggakan keunggulan informasi dalam tata kelola lingkungan, efisiensi pemerintahan dapat dikurangi. Dengan demikian, perbedaan fungsi memiliki kriteria objektif untuk menilai bagaimana trade-off adalah konsensual. Masih banyak kontroversi mengenai apakah tata kelola lingkungan harus terpusat atau terdesentralisasi. Literatur yang ada berfokus pada apakah desentralisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Stewart (1977) berpendapat bahwa dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah mungkin “berlomba ke bawah” (RTB) dalam tata kelola lingkungan. Salah satu alasannya mungkin karena persaingan pemerintah daerah di tingkat ekonomi yaitu, pemerintah telah menurunkan standar peraturan lingkungan untuk mendorong pembangunan industri. Alasan lain mungkin terletak pada “tumpangan bebas” perilaku yang disebabkan oleh eksternalitas positif dari tata kelola lingkungan yaitu, pemerintah menikmati daerah yang berdekatan' pencapaian tata kelola polusi lintas batas, tetapi tidak menanggung biaya yang sesuai. Oat (2002) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki beberapa atribut, yang mungkin termasuk barang publik murni atau barang dengan efek limpahan antar-regional, tetapi mungkin juga barang publik lokal yang hanya dipengaruhi oleh emisi polusi lokal. Dalam kasus terakhir, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang lebih besar dalam tata kelola lingkungan berdasarkan prinsip desentralisasi. Informasi lingkungan memiliki karakteristik yang serupa: di satu sisi, pengumpulan informasi lingkungan memiliki karakteristik skala ekonomi, dan dengan demikian unifikasi pengumpulan dan publikasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi
---------------------	--

	biaya; di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam mengumpulkan informasi lingkungan lokal, sehingga mereka dapat membanggakan kemampuan yang lebih kuat untuk menggunakan informasi sesuai dengan keadaan (Oates dan Portney, 2003). Akibatnya, tata kelola lingkungan akan kembalifldll karakter nonlinear. Artinya, jika biaya marjinal cembung, maka tata kelola lingkungan pemerintah pusat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan, sedangkan jika biaya marjinal cekung, maka pemerintah daerah perlu lebih terlibat (Banzhaf dan Chupp, 2012). Isu lingkungan dengan signifikanfikator karakteristik daerah yang tidak dapat memberikan hak tata kelola yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan tidak akan menghasilkan RTB (Oates dan Schwab, 1988; Revesz, 1992).
Diskusi	Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi untuk penelitian yang ada dalam tiga cara: (1) Dikemukakan metode baru untuk memverifikasi fenomena RTB dalam peraturan lingkungan hidup pemerintah daerah. Dibandingkan dengan metode lain, kami memverifikasi keberadaan RTB secara lebih langsung, dan variabel inti kami memiliki eksogenitas yang lebih baik. (2) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peraturan lingkungan pemerintah daerah juga dianalisis, termasuk kekuatan pasar dan tingkat peraturan perundang-undangan. Mengklarifikasi faktor-faktor ini juga memiliki implikasi kebijakan yang menonjol. (3) Kami memeriksa karakteristik dinamis dari pemerintah daerahfiperaturan lingkungan, termasuk perubahan perilaku dari waktu ke waktu dan cara mengatasi faktor penghambat. Struktur makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua mengusulkan model konseptual pemerintah daerah' perilaku dan motif lingkungan dan memberikan penjelasan tentangfiperbedaan cant antara yang di Cina dan beberapa negara maju. Pada bagian ketiga, kami membangun model empiris, membahas pemilihan variabel, dan melakukan analisis awal terhadap data. Pada bagian keempat, kami melakukan analisis ekonometrika sesuai dengan model dan mendiskusikan hasilnya, sedangkan bagian terakhir membahas implikasi kebijakan dan menyimpulkan.
Consulusion	Sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, Cina telah membentuk struktur industri dengan proporsi industri padat energi yang tinggi, masalah lingkungan yang serius telah menjadi perhatian utama penduduk biasa,

pemerintah Cina, dan masyarakat internasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama mengapa pemerintah daerah local “berlomba ke bawah” disebabkan oleh desentralisasi kekuasaan yang berlebihan dalam tata kelola lingkungan. Namun demikian, untuk menghentikan trade-off antara tingkat pertumbuhan dan kualitas lingkungan, negara telah menetapkan sistem dari tata kelola lingkungan yang terpusat dalam pengaturan kelembagaan. Dalam konteks ini, apakah pemerintah daerah? officials masih termotivasi untuk berkorban fice kualitas lingkungan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi? Apakah pertumbuhan ekonomi begitu kuat sehingga pemerintah daerah? officials akan terus mencari cara untuk menghindari hukum, peraturan, atau kondisi lain untuk mencapai tujuan mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, makalah ini membahas data tentang spesifikasi Cinafic darifisistem pertukaran cials 'sebagai variabel inti dalam mengukur dampak lokal pemerintahfisial di CO2 emisi. Makalah ini juga mengukurfisial' niat perilaku darifi penting dalam menghadapi konketegangan dari dua aspek: inflberasal dari kedua provinsi tetangga dan provinsi non-berdekatan. Itu fiTemuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepala eksekutif yang dipindahkan dari tempat lain menunjukkan pola jatuh-naik beberapa tahun setelah masa jabatan mereka dimulai, dan semakin terpusat tata kelola lingkungan dan ketatnya lingkungan hukum, semakin besar pengekanan terhadap lingkungan. deregulasi; (2) kekuatan pasar dapat menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk officials untuk memudahkan kontrol lingkungan mereka, bukan kendala; dan (3) kepala eksekutif yang dimutasi dari provinsi yang berdekatan lebih cenderung melonggarkan peraturan lingkungan daripada mereka yang berasal dari provinsi yang tidak berdekatan. Hasil ini menarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah officials di Cina memiliki dorongan batin untuk memudahkan peraturan lingkungan, yang sistematis dan kuat, sehingga terlepas dari beratnya lingkungan hukum dan kelembagaan, atau ketidaktahuan dengan lingkungan yang mengatur, kendala akan dilepaskan lebih lanjut oleh tindakan pemerintah daerah darifisial. Dari perspektif ekonomi makro, Cina berada di garis depan Kurva Kuznets Lingkungan; yaitu, ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan emisi polusi,

	yang dapat menjelaskan fakta bahwa pemerintah daerah ficials berusaha untuk pertumbuhan yang lebih cepat dengan mengorbankan kualitas lingkungan (melindungi perusahaan polusi yang ada). Faktanya, pertumbuhan yang lebih cepat adalah salah satu masalah yang muncul pada tahap lepas landas dari ekonomi secara keseluruhan, alasannya adalah bahwa negara-negara berkembang' keunggulan komparatif dan posisinya dalam jaringan pembagian kerja internasional seringkali membuat mereka terlibat dalam industri padat energi dan padat karya. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Kurva Kuznets Lingkungan, korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan emisi polusi pada akhirnya akan dibalik dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di satu negara. Selama periode ini, kemajuan masyarakat pasti akan disertai dengan perubahan keunggulan komparatif dan proses pertumbuhan dan transformasi. Artinya, industri padat teknologi akan terus muncul, dan perusahaan dengan kepadatan konsumsi energi yang tinggi secara bertahap akan dihilangkan. Inovasi telah menjadi pendorong terbesar pertumbuhan. Dalam jangka pendek, ini adalah penyesuaian struktural yang menyakitkan dan bahkan mungkin disertai dengan sejumlah besar pengangguran struktural, kegagalan bisnis, dan hilangnya industri. Namun, dalam jangka panjang, transformasi ini merupakan peningkatan kesinambungan pertumbuhan, disertai dengan pengurangan emisi polusi yang berkelanjutan dan peningkatan daya dukung ekologis.
Kritis	Sampai batas tertentu, makalah ini menegaskan bahwa hanya mengandalkan reformasi sentralisasi lingkungan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan "berlomba-ke-bawah" dorongan pemerintah daerah; sebagai gantinya, menghilangkan "berlomba-ke-bawah" Impuls membutuhkan kecocokan yang erat antara kekuatan lingkungan, ekonomi, dan politik dalam sistem pemerintahan dan insentif yang simetris dan seimbang untuk pemerintah daerah.fisial. Seperti yang kita fidan dalam tulisan ini, sulit untuk menghilangkan dorongan yang melekat pada pemerintah daerah untuk berkorban fice lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi hanya dengan reformasi terpusat tata kelola lingkungan tanpa lingkungan ekonomi makro yang cocok dan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk mencapai

	transformasi pembangunan ekonomi dan membalikkan “hubungan tuas” antara pertumbuhan dan kualitas lingkungan sesegera mungkin. Penting juga untuk memastikan bahwa departemen perlindungan lingkungan lokal benar-benar bebas dari ketergantungan pada sumber daya pemerintah daerah dan perubahan dari “kendala lunak” untuk “kendala keras” dari lingkungan. Selain itu, kualitas lingkungan harus dimasukkan ke dalam sistem penilaian kinerja pemerintah daerah dalam bentuk insentif positif.
--	--